

Bahan ajar

handout Komunikasi Politik (pertemuan 4)

STUDI KOMUNIKASI POLITIK¹

Oleh: Kamaruddin Hasan²

Studi komunikasi politik yang terorganisasi dapat ditandai dari analisa teknik propaganda Harold Lasswell (1927), yang kini dikenal sebagai bapak perintis ilmu komunikasi ketika mengumumkan hasil penelitiannya tentang propaganda politik dalam *The American Political Science Review*. Hasil riset Laswell itu menjelaskan bagaimana “efek” dan “pengaruh” komunikasi massa. Menurutnya, sebuah tindak komunikasi bisa dianalisa dengan pertanyaan “siapa/ mengatakan apa/ di saluran yang mana/ kepada siapa/ dengan akibat (efek) apa”.

Sebagai disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner; ilmu komunikasi, politik, sosiologi, psikologi, sejarah, retorika, dan lainnya. Menurut Ryfe (2001), komunikasi politik tetap mendapatkan tempat, karena adanya komitmen teoritis dan metodologis pada riset-riset awal.

Komitmen tersebut pada gilirannya dibentuk oleh tiga disiplin utama, yaitu; (1) Psikologi Sosial, (2), Riset Komunikasi Massa dan (3) Ilmu Politik. Adapun, batasan wilayah studi komunikasi politik adalah; *opinion, attitudes, beliefs, politics as a process* dan *media effect*. Tetapi batasan ini, menurutnya bersifat fleksibel. Luasnya bidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya memunculkan banyak defenisi.

Istilah komunikasi politik mulai banyak disebut-sebut bermula dari tulisan Gabriel Almond yang berjudul *The Politics of the Development Areas* pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam dalam setiap sistem politik. Berbeda dengan ilmuwan politik yang lebih membahas komunikasi politik

¹ Diambil dari berbagai sumber

² Dosen Prodi Ilmu komunikasi Fisip Unimal

berkenaan dengan sistem politiknya, yaitu proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan otoritatif. Ilmuwan komunikasi membahas komunikasi politik berkenaan dengan unsur-unsur komunikasinya sebagai upaya merumuskan suatu komunikasi politik yang efektif.

Ada banyak definisi komunikasi politik. Salah satunya yang cukup tegas dan gampang diungkapkan Michael Schudson (1997:311). Menurut Michael Schudson komunikasi politik itu, “*any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward the use of power*”. Gejala komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah. *Pertama*, bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. *Kedua*, bagaimana infrastruktur politik merespons dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

Relasi komunikasi politik antar suprastruktur dan infrastruktur politik, dengan gamblang bisa dipetakan bila semua komponen yang berkaitan dengan komunikasi politik digambarkan. Tentu saja realitas komunikasi politik di suatu negara, sangat bergantung pada sistem politik yang dianutnya. Dari sistem politik yang dianut tersebut, terbentuklah sebuah sistem komunikasi politik yang pada dataran empiriknya tidak terlalu persis mencerminkan sistem politik itu sendiri.

Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistem suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dan subsistem infrastruktur politik (partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dll) –nya. Proses politik berkenaan dengan proses input dan output sistem politik.

Dalam model komunikasi politik, bahwa komunikasi politik model input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukungan mengenai suatu isu-isu aktual

yang datang dari infrastruktur ditujukan kepada suprastruktur politiknya untuk diproses menjadi suatu keputusan politik (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan sebagainya). Sedangkan komunikasi politik model output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam suatu sistem politik. Sebagai proses politik, komunikasi berperan menghubungkan bagian-bagian dari sistem politik. Gabriel Almond (dalam Alfian, 1994) mengibaratkan komunikasi sebagai aliran darah yang mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan ke jantung pemrosesan sistem politik.

Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah". Menurut *Gabriel Almond (1960)*: komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik.

Unsur membahas mengenai komunikasi politik yang penjelasannya melingkupi pengertian dan konsep komunikasi politik seperti komunikator politik, pesan politik, saluran dan media komunikasi politik, khalayak politik dan efek komunikasi politik. Penjelasan diperlengkap lengkap dengan bahasan tentang sistem politik, retorika dan politik, opini public, kampanye politik dan iklan, pemasaran politik, public relations politik, penelitian politik dan peran media (Old & New Media) dalam Komunikasi politik.

Sedangkan Ilmu Komunikasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Disebut demikian karena pendekatan-pendekatan yang dipergunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan

(disiplin) lainnya seperti linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Hal ini akan terlihat secara jelas dalam pembahasan mengenai berbagai teori, model, perspektif dan pendekatan dalam ilmu komunikasi. Sifatnya yang multidisipliner ini tidak dapat dihindari karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi sangat luas dan kompleks, menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi dari kehidupan manusia.

Berkaitan dengan komunikasi sebagai proses politik, Oliver Garceau (dalam Dan Nimmo, 1994) menulis tentang proses politik sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerja sama, dan persaingan yang menghubungkan warga negara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Serupa dengan Garceau, Nurudin (2004) menyatakan sebagai proses politik. Komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutan dan dukungan) ke kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik (*feedback*).

Berkaitan dengan komunikasi sebagai proses politik, Oliver Garceau (dalam Dan Nimmo, 1994) menulis tentang proses politik sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerja sama, dan persaingan yang menghubungkan warga negara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Serupa dengan Garceau, Nurudin (2004) menyatakan sebagai proses politik, komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutan dan dukungan) ke kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik (*feedback*).

Bagaimana dengan proses Pendidikan politik, pendidikan politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. Disebut *forming* karena di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status, kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan disebut *bildung* (pendidikan diri

sendiri) karena istilah ini menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik (Khoiron, dkk. 1999: 4). Pendidikan politik pada hakikatnya adalah sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu, atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial, dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat.

Di antara para peneliti politik terdapat aliran yang berargumentasi bahwa jika seseorang telah memiliki kepribadian, terdapat kemungkinan yang besar bahwa kepribadian itu akan diproyeksikan pada objek politik, dengan demikian mewarnai proses politik dan menentukan perilaku politiknya. Harold Laswell mengajukan variasi dari tema ini dengan mengajukan suatu rumusan yang disebut “Manusia Politik” dan bila diterjemahkan rumus ini mengatakan bahwa motif pribadi ditransformasikan dan dipindah tempatkan ke dalam gelanggang publik, kemudian dirasionalkan menurut kepentingan publik dan nilai komunitas yang diterima secara luas, karena kepribadian itu produk diri yang juga mempengaruhi belajar politik.

Selanjutnya, Hess dan Newman (dalam Effendy 1989: 1) mendefenisikan sosialisasi politik sebagai suatu proses mentransmisi pola-pola nilai dan perilaku politik yang stabil dalam suatu masyarakat. Semua pembelajaran politik baik formal maupun informal, tidak hanya melibatkan belajar politik secara eksplisit. Dengan demikian sosialisasi politik mencakup semua aktivitas dalam belajar politik, bagaimana memperoleh sikap dan nilai-nilai tentang politik dan bagaimana bertindak secara politik. Sudah banyak penelitian tentang sosialisasi politik, namun ada satu kajian yang paling erat kaitannya dengan sosialisasi politik yaitu teori belajar sosial (*social learning theory*).

Dalam perspektif teori belajar sosial tersebut, perubahan kognisi politik sebagai salah satu hasil belajar (sosialisasi) politik bermula dari pengamatan terhadap sebuah peristiwa, baik langsung maupun tidak langsung yang disertai peniruan terhadap model yang diamati (*modeling*). Teori belajar sosial berakar pada teori psikologi aliran perilaku (*behaviourism*), yang menyandarkan konsepsinya pada empirisme dan pragmatisme. Menurut teori ini cara seseorang mempelajari perilaku baru dibedakan menjadi dua cara, yaitu (1) belajar melalui konsekuensi respon (*learning by response consequences*), dan (2) belajar melalui peniruan (*learning through modeling*).

Belajar melalui konsekuensi respon mengacu kepada pengalaman langsung berkenaan dengan akibat suatu respon (tindakan). Belajar melalui konsekuensi respon memainkan tiga fungsi, yakni: (1) menyediakan informasi, (2) melahirkan motivasi, dan (3) memperkuat respon secara otomatis. Model lain yang erat kaitannya dengan sosialisasi politik di kemukakan oleh Kraus dan Davis (dalam Effendi 1989:1) ia mengemukakan ada dua model sosialisasi politik yaitu:

1. Model progresif linear terbagi atas tiga model yaitu: (a) model peran, (b) model perilaku, dan (c) model sikap politik sebagai jalan untuk menjelaskan pembangunan sikap, peran, dan perilaku politik. Model peran memandang perilaku politik dikembangkan dari terpaan terhadap peran politik. Peran politik yang kita lihat pada individu akan menjadi basis bagi aktivitas politik selanjutnya. Keluarga memainkan peran yang cukup dominan dalam membangun sikap politik yang pada akhirnya akan melahirkan kedewasaan politik serta perilaku politik.
2. Model perilaku politik ini berasumsi bahwa anak-anak pada umumnya menganut pandangan politik yang mirip atau hampir sama dengan orang tuanya. Model

ini memandang bahwa orang tua mengindoktrinasi anaknya dalam dalam hal sistem politik. Sedangkan model sikap perilaku terlalu menyederhanakan pengaruh orang lain. Padahal sikap politik itu sendiri dipelajari dalam angka waktu yang relatif lama sehingga tidak realistis bila kita beranggapan bahwa sikap politik anak selalu berasal dari sikap politik orang tua. Sepanjang tahun 50-an hingga awal 60-an mayoritas studi tentang sosialisasi politik menunjukkan bahwa pengaruh keluarga menyentuh semua aspek-aspek lain dari proses sosialisasi yaitu: teman sebaya, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, usia, dan persepsi yang keseluruhannya bagaikan berbentuk lingkaran yang di tengah-tengahnya terdapat keluarga. Studi tentang agen sosialisasi politik menunjukkan bahwa keluargalah yang menjadi faktor dominan yang membentuk arah dan derajat pengaruh terhadap perilaku politik.

Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat subsistem suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif) dan subsistem infrastruktur politik (partai politik, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dll) –nya. Proses politik berkenaan dengan proses input dan output sistem politik. Dalam modul komunikasi politik, bahwa komunikasi politik modul input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukungan mengenai suatu isu-isu aktual yang datang dari infrastruktur ditujukan kepada suprastruktur politiknya untuk diproses menjadi suatu keputusan politik (berupa undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan sebagainya).

Sedangkan komunikasi politik modul output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dalam suatu sistem politik. Sebagai proses politik, komunikasi berperan

menghubungkan bagian-bagian dari sistem politik. Gabriel Almond (dalam Alfian, 1994) mengibaratkan komunikasi sebagai aliran darah yang mengalirkan pesan-pesan politik yang berupa tuntutan, protes, dukungan ke jantung pemrosesan sistem politik.

=====